

LAPORAN AKHIR MAGANG
EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN REALISASI
ANGGARAN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN
SLEMAN



Disusun Oleh :

Regita Cahyani Putri

22312053

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR MAGANG
EVALUASI PERENCANAAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN REALISASI
ANGGARAN DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN
SLEMAN

Disusun Oleh:

Regita Cahyani Putri

22312053

Diperiksa oleh:

Yogyakarta, 12 Februari 2026

Dosen Pembimbing



Aditya Pandu Wicaksono S.E., Ak., M.Ak., CA

BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/MAGANG

MAGANG BERJUDUL

Evaluasi Perencanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

Disusun oleh : REGITA CAHYANI PUTRI

Nomor Mahasiswa : 22312053

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 02 Maret 2026

Penguji/Pembimbing Magang : Aditya Pandu Wicaksono, SE., Ak., M.Ak.

Penguji : Kinanthi Putri Ardiami, SE., Ak., M.Ak.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Regita Cahyani Putri

NIM : 22312053

Program Studi : Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Judul Kegiatan : Evaluasi Perencanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran
di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Tempat Pelaksanaan : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Laporan akhir magang ini adalah tulisan saya sendiri yang dibuat tanpa bantuan dari orang lain, kecuali dari pembimbing dan narasumber yang terkait.
- 2) Laporan akhir magang ini belum pernah diterbitkan ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun baik di Universitas Islam Indonesia ataupun di perguruan tinggi lainnya.
- 3) Pada laporan akhir magang ini tidak terdapat karya orang lain yang ditulis kecuali dicantumkan dalam bentuk kutipan dan rujukan yang mana tercantum juga dalam daftar Pustaka sebagai referensi.

Yogyakarta, 12 Februari 2026


Regita Cahyani Putri
22312053

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi ketentuan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan laporan akhir magang ini tidak dapat terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa sejak masa perkuliahan hingga tahap penyusunan laporan berbagai kontribusi sangat berperan dalam kelancaran penyelesaian laporan magang ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta bantuan materi selama proses perkuliahan dan penyusunan laporan magang;
2. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D., CFA, CertIPAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., SH., M.Sc., Ph.D. selaku Kepala Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Aditya Pandu Wicaksono S.E., Ak., M.Ak., CA selaku Sekretaris Prodi dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktu dan pemikiran yang telah diberikan selama penyusunan laporan akhir magang ini;
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan dan membantu saya selama masa perkuliahan;
6. Seluruh pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, khususnya bidang akuntansi dan pelaporan, atas kesempatan, fasilitas, serta dukungan data dan informasi yang diberikan selama kegiatan;
7. Sahabat dan rekan-rekan saya yaitu yuli, caca, vita, azmi, nailah, amini, dan wulan yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang ini.

8. Muhammad Luthfi Azhar yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan dorongan positif selama proses penyusunan laporan hingga akhir;
9. Serta, pihak – pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu atas bantuan yang diberikan;

Sebagai penutup, penulis berharap semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa Laporan Akhir magang ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Masukan tersebut diharapkan dapat membantu penyempurnaan laporan ini agar menjadi karya tulis yang lebih baik. Selain itu, penulis juga berharap laporan magang ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pihak-pihak berkepentingan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA TUGAS AKHIR/SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Magang.....	5
1.4. Manfaat Kegiatan.....	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1 Penganggaran Sektor Publik.....	7
2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah.....	10
2.1.3 Evaluasi Kinerja Anggaran.....	11
2.2. Penelitian Terdahulu.....	14
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Penelitian.....	16
3.2. Sumber dan Data Penelitian.....	16
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.4. Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV	18

HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1. Profil Perusahaan	18
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	18
4.1.2 Struktur Perusahaan	19
4.2. Aktivitas Magang	20
4.3. Proses Penyesuaian Perencanaan Anggaran di BKAD	24
4.4. Pelaksanaan dan realisasi anggaran	27
4.5. Evaluasi penyesuaian perencanaan anggaran	28
BAB V	30
SIMPULAN DAN SARAN	30
5.1. Simpulan	30
5.2. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Aktivitas Magang.....	21
Table 4.2 Ketercapaian Pelaksanaan Magang	21
Tabel 4.3 Perbandingan Perencanaan dan Penyesuaian Anggaran BKAD	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Sleman 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam kerangka otonomi daerah pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sebagai rencana keuangan yang tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan secara periodik. Salah satu komponen utama dalam laporan keuangan daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai selama periode anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi berbagai pemangku kepentingan seperti pimpinan daerah, DPRD, aparat pengawas, dan masyarakat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah serta tingkat kepatuhan terhadap perencanaan anggaran yang telah disepakati.

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) menjadi fondasi awal bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah. Renja tidak hanya memuat arah prioritas pembangunan dan program strategis, tetapi juga menjadi dasar penetapan pagu anggaran yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seiring dengan pelaksanaan

kegiatan, perubahan kondisi dan kebutuhan sering kali mengharuskan adanya penyesuaian terhadap rencana yang telah ditetapkan. Untuk mengakomodasi dinamika tersebut, diperlukan instrumen pengendalian yang mampu memantau perkembangan realisasi secara berkala. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) berfungsi sebagai alat monitoring yang mencatat capaian fisik maupun keuangan sehingga proses evaluasi dan penyesuaian perencanaan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan demikian, hubungan antara Renja dan RFK menjadi elemen krusial dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif sebelum tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai laporan akhir kinerja anggaran daerah.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memiliki peran penting sebagai alat evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah karena menyajikan informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dalam satu periode. Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, alokasi, dan penilaian kinerja organisasi (Al Makka, Saerang, & Elim, 2016). Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan utama yang digunakan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan realisasi yang dicapai. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih sering menghadapi permasalahan berupa ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai. Kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya realisasi belanja, rendahnya tingkat penyerapan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan anggaran tahun, dan munculnya sisa anggaran pada akhir tahun anggaran. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan dan kondisi riil pelaksanaan di lapangan.

Realisasi anggaran yang belum optimal juga berdampak pada efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah. Anggaran yang tidak terserap secara

maksimal berpotensi menunda pencapaian target program dan kegiatan, serta mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap proses perencanaan dan penyesuaian anggaran selama tahun berjalan.

Secara normatif, penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya melalui Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. regulasi tersebut menegaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) harus menyajikan informasi realisasi anggaran yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan sehingga mampu memberikan Gambaran yang jelas mengenai kinerja pelaksanaan APBD. Standar ini bertujuan menjamin konsistensi penyusunan laporan keuangan daerah serta mendukung evaluasi kinerja yang objektif.

Pengelolaan keuangan daerah termasuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut mengatur secara rinci tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan adanya kerangka regulasi tersebut, proses perencanaan, penyesuaian, dan pelaporan anggaran diharapkan berjalan secara sistematis dan terintegrasi.

Meskipun demikian, penerapan regulasi di tingkat teknis tidak selalu berjalan dengan secara optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, antara lain kompleksitas prosedur administrasi, dinamika perubahan kebijakan anggaran, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengaruh faktor politis dalam penganggaran. Tantangan-tantangan tersebut berpotensi menyebabkan perlunya penyesuaian perencanaan anggaran agar tetap sesuai dengan kondisi aktual.

Dalam rangkaian pengelolaan keuangan daerah, realisasi anggaran yang tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan hasil dari proses perencanaan dan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahap awal perencanaan dan pengendalian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Tahap awal perencanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan selama periode satu tahun anggaran.

Namun dalam praktiknya, perencanaan yang tertuang dalam Renja sering kali memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dengan dinamika pelaksanaan anggaran yang dilakukan melalui dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi secara berkala. Melalui RFK, perkembangan realisasi fisik dan keuangan dapat dikendalikan serta disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul selama tahun anggaran berjalan. Oleh karena itu evaluasi terhadap keterkaitan antara Renja sebagai rencana awal, RFK sebagai mekanisme penyesuaian dan LRA sebagai bentuk realisasi akhir menjadi penting untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah termasuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Peran tersebut menjadikan BKAD sebagai unit yang menentukan kualitas keterkaitan antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang tercermin dalam APBD sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah (Erliyani & Sulastiningsih, 2023).

Dalam pelaksanaannya, perencanaan awal di BKAD dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang kemudian dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Dokumen Renja berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah selama satu tahun anggaran, sedangkan RFK digunakan sebagai instrumen pengendalian untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan serta tingkat

penyerapan anggaran secara periodik (Mufarrihah, Atikah, & Djasuli, 2024). Kedua dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan rencana awal sebelum tercermin di LRA. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyesuaian perencanaan melalui Renja dan RFK menjadi relevan untuk memahami keterkaitan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Evaluasi tersebut penting dilakukan untuk menilai sejauh mana proses perencanaan anggaran mampu mengakomodasi dinamika pelaksanaan kegiatan serta memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan daerah berjalan secara efektif dan efisien (Ananda et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada evaluasi perencanaan anggaran dalam pelaksanaan realisasi anggaran pada BKAD Kabupaten Sleman dengan judul “Evaluasi Perencanaan Anggaran dalam Pelaksanaan Realisasi Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses perencanaan dan penyesuaian anggaran serta menilai keterkaitan antara proses tersebut dengan capaian realisasi anggaran yang tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, sehingga penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Rumusan masalah ini difokuskan pada penilaian ketercapaian realisasi anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan.

1.3. Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai proses pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, khususnya dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan penyusunan Laporan Realsiasi Anggaran (LRA).

1.4. Manfaat Kegiatan

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan referensi dan berguna untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih baik.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, kegiatan magang ini diharapkan memberikan masukan dan gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan dan realisasi anggaran untuk mendukung peningkatan efektivitas dan ketepatan penyusunan laporan keuangan daerah.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman, hasil magang dapat menjadi bahan informasi pendukung dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah terutama terkait kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran.
3. Untuk penulis, kegiatan magang ini memberikan pengalaman praktis dan pemahaman langsung mengenai proses pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kesiapan dalam menghadapi dunia kerja.
4. Untuk Universitas Islam Indonesia, laporan magang ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi akademik dan dokumentasi kegiatan pembelajaran berbasis praktik di instansi pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Penganggaran Sektor Publik

a. Pengertian Sektor Publik

Sektor publik merupakan entitas yang memiliki karakteristik khusus karena mengelola sumber daya ekonomi dalam jumlah besar untuk kepentingan masyarakat. Meskipun organisasi sektor publik melakukan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan, pengelolaan sumber daya tersebut tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba, tetapi untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Oleh karena itu, setiap penggunaan dana publik harus dikelola secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Mufarrihah, Atikah, & Djasuli, 2023).

Akuntansi sektor publik berperan sebagai alat pengelolaan dana Masyarakat yang mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan aktivitas keuangan pemerintah. Dalam praktiknya, penganggaran menjadi bagian yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dan perencanaan dan pengendalian keuangan daerah. Melalui penganggaran yang tepat, pemerintah dapat menentukan prioritas kebijakan serta meningkatkan kualitas program dan kegiatan agar selaras dengan tujuan Pembangunan dan kebutuhan masyarakat (Erliyani & Sulastiningsih, 2023).

b. Pengertian Penganggaran

Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang mencakup perkiraan pendapatan dan pembiayaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan ke berbagai kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang ingin dicapai. Setiap kegiatan tersebut selanjutnya

dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan kerja. Dalam sektor publik, penganggaran dipahami sebagai suatu rencana pelaksanaan program yang berorientasi pada tujuan dan sasaran dalam periode tertentu disertai dengan estimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Penganggaran juga digunakan sebagai alat untuk membandingkan kebutuhan masa berjalan dengan periode sebelumnya serta sebagai dasar mengantisipasi kebutuhan di masa yang akan datang (Nurkhalis & Khusaini, 2019).

Dalam konteks pemerintahan, penganggaran memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor privat karena berorientasi pada kepentingan publik. Nurkhalis dan Khusaini (2019) menjelaskan bahwa penganggaran sektor publik disusun sebagai pedoman formal dalam pelaksanaan program pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pelayanan masyarakat.

c. Penganggaran Sektor Publik

Anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang disusun satuan moneter (rupiah) untuk jangka waktu tertentu yang umumnya satu tahun anggaran. anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan utama bagi pemerintah. Oleh karena itu, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu difokuskan pada dukungan terhadap kegiatan dan program yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Alokasi anggaran daerah diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal secara lebih akurat (Nurkhalis & Khusaini 2019).

Anggaran sektor publik disusun untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan layanan listrik, air bersih, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya agar dapat terpenuhi secara layak. Selain itu, anggaran sektor

publik juga mencerminkan perubahan prioritas kebutuhan dan aktivitas masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pada Tingkat pemerintah daerah, anggaran sektor publik tersebut diwujudkan secara formal dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai pedoman pelaksanaan publik selama satu tahun anggaran (Ananda et al., 2023).

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun dalam satuan moneter dan ditetapkan dengan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintah, Pembangunan, dan pelayanan publik. APBD memiliki fungsi otorisasi perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang menunjukkan perannya sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (1), APBD disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah serta kemampuan pendapatan daerah (Bafagehi, Ilat, & Afandi, 2023)

c. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah cara untuk memprediksi perencanaan pembangunan satu tahun ke depan yang mencakup pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan (Marno Wance, 2019). Perencanaan anggaran menjadi tahap yang sangat penting karena anggaran yang tepat sasaran akan berpengaruh pada indeks pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah daerah dapat memprioritaskan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya keuangan lebih efisien dan efektif (Rakhmawati & Pratama,

2022). Selain itu, perencanaan anggaran yang sistematis juga memudahkan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang dapat meminimalkan pemborosan atau penyalahgunaan dana publik. Maka proses penyusunan anggaran harus mempertimbangkan aspek perencanaan strategis, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

f. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah tahap di mana rencana anggaran yang telah dibuat sebelumnya dijalankan. Pada tahap ini, seluruh penerima dan pengeluaran dicatat dan dilaporkan sesuai periode anggaran, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pemantauan realisasi anggaran sangat penting untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Pamungkas & Sutarti, 2025). Ketika realisasi sesuai dengan yang direncanakan, hal ini menandakan pengelolaan keuangan daerah yang berjalan baik. Namun, jika terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasinya maka menjadi tanda adanya kendala dalam perencanaan, penentuan prioritas, atau pelaksanaan program. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran menjadi langkah penting agar penggunaan dana publik tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

2.1.2 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam mengatur sumber daya keuangan yang dimiliki, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga pengendalian dana dan aset. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan organisasi dapat berjalan secara terarah, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nadofah, Jaenudin, & Utami, 2024). Melalui

manajemen keuangan yang baik, organisasi dapat menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Konsep manajemen keuangan tersebut tidak hanya diterapkan pada organisasi yang berorientasi laba, tetapi juga memiliki peran penting dalam sektor publik. Dalam pemerintahan, manajemen keuangan daerah menjadi instrumen utama dalam mengelola keuangan daerah secara tertib dan bertanggung jawab yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan daerah (Sari & Putra, 2023). Dengan demikian, manajemen keuangan daerah menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan APBD dan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja anggaran guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

2.1.3 Evaluasi Kinerja Anggaran

a. Pengertian Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah proses sistematis yang dilakukan manajemen untuk menilai Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara kinerja aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini umumnya dilaksanakan secara berkala dalam periode tertentu untuk mengetahui keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas, sehingga menjadi dasar perbaikan kinerja di masa mendatang (Dewi & Wiguna, 2022). Prinsip evaluasi kinerja tersebut tidak hanya diterapkan pada penilaian kinerja individu, tetapi juga relevan dalam sektor publik terutama dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, kinerja anggaran juga memerlukan evaluasi yang terstruktur untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran serta memastikan penggunaan sumber daya keuangan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

b. Pengertian Evaluasi Kinerja Anggaran

Menurut Suliantoro (2020), evaluasi kinerja anggaran merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menilai pelaksanaan anggaran melalui pengukuran dan analisis terhadap tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pandangan tersebut, evaluasi kinerja anggaran memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan anggaran, sehingga dapat dijadikan dasar dalam upaya perbaikan pengelolaan.

c. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran bertujuan untuk menilai antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi tersebut bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dalam menyusun anggaran berikutnya, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, dan mendorong peningkatan pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah (Putri & Handayani, 2023). Evaluasi kinerja anggaran dalam pemerintahan menjadi sarana pengendalian yang penting agar penggunaan dana publik lebih terarah dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian target Pembangunan daerah.

d. Indikator Evaluasi Kinerja Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran dalam sektor publik digunakan dengan menggunakan sejumlah indikator untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran. Indikator yang umum digunakan yaitu efisiensi dan efektivitas yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Suliantoro (2020) menekankan bahwa pengukuran efisiensi penting untuk melihat kesesuaian antara alokasi anggaran dan realisasi output yang

dihasilkan. Sedangkan efektivitas digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Dewi dan Wiguna (2022), evaluasi anggaran berbasis kinerja dilakukan melalui pengukuran rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran. Selain itu, evaluasi kinerja anggaran juga dapat dilakukan melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang digunakan untuk menilai kualitas dan ketetapan pelaksanaan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan (Armista, Oemar, & Anita, 2024). Melalui penggunaan berbagai indikator tersebut, evaluasi kinerja anggaran diharapkan mampu memberikan Gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pengelolaan anggaran serta menjadi dasar perbaikan pada periode anggaran berikutnya.

e. Metode Evaluasi Kinerja Anggaran

Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (2024), Kinerja anggaran dalam sektor publik dapat dievaluasi melalui :

- Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance-Based Budgeting*) yaitu menilai kinerja anggaran berdasarkan keterkaitan antara alokasi dana dan hasil yang dicapai, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dapat diukur.
- *Balance Scorecard* (BSC) digunakan untuk menilai kontribusi anggaran terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi dari beberapa perspektif, tidak hanya keuangan.
- *Key Performance indicators* (KPI) berfungsi sebagai indikator terukur untuk menilai keberhasilan program atau kegiatan yang didanai anggaran dalam mencapai target *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Edi Mulyadi	“Determinasi Perencanaan Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan terhadap Realisasi Penyerapan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang”	Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Realisasi Penyerapan Anggaran	Perencanaan anggaran dan penatausahaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penyerapan anggaran
2	Lukfiah Irwan Radjak dan Ferawaty Humolungo	“Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan terhadap Realisasi Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo”	Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Kegiatan, dan Realisasi Anggaran	Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran, sedangkan pelaksanaan kegiatan cenderung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga perencanaan menjadi variabel dominan.
3	Muhammad Arief Pramusty dan Nurfadhilah	“Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Aset	Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah dan Realisasi	Realisasi anggaran APBD tahun 2018–2022 berfluktuasi dan menunjukkan adanya permasalahan

	Ahmad Hasibuan	Daerah Pemerintah Kota Medan”	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	pengelolaan anggaran yang memerlukan evaluasi lebih lanjut.
--	-------------------	----------------------------------	--	---

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan utamanya terletak pada pembahasan mengenai perencanaan dan realisasi anggaran sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perencanaan yang baik berkontribusi terhadap peningkatan realisasi atau penyerapan anggaran, yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

Perbedaannya terletak pada metode dan ruang lingkup analisis. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh variabel tertentu terhadap realisasi anggaran, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi proses penyesuaian perencanaan melalui Renja dan RFK. Selain itu, objek penelitian dan lokasi yang berbeda turut menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan anggaran khususnya dalam hal perencanaan, realisasi, dan evaluasi kinerjanya. Pendekatan ini memungkinkan penulis memperoleh informasi langsung dari pengalaman dan pandangan informan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Dengan penelitian deskriptif kualitatif, penulis dapat menjelaskan secara jelas dan sistematis bagaimana proses perencanaan dan realisasi anggaran dilakukan, serta bagaimana evaluasi kinerja anggaran diterapkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan.

3.2. Sumber dan Data Penelitian

Sumber dan data pada pelaksanaan penelitian ini diperoleh langsung dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Data ini diperoleh dari pegawai yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Data primer dipandang lebih valid dan akurat karena diperoleh langsung dari pihak yang menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman seperti Rencana Kerja (Renja), Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) dan Laporan

Realisasi Anggaran (LRA). Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pegawai atau narasumber untuk mengetahui fakta dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Teknik ini membantu penulis merangkum informasi, menganalisis data, dan memahami pendapat.

2. Pengumpulan Dokumentasi Instansi

Pengumpulan dokumen dilakukan dengan mengambil data langsung dari instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendukung analisis mengenai pengelolaan anggaran dan kegiatan instansi.

3.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diterapkan untuk menjelaskan secara rinci proses pengelolaan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Analisis dilakukan dengan mempelajari data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi instansi, sehingga proses pengelolaan anggaran dapat dipahami secara menyeluruh dan sistematis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset. BKAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sleman melalui Sekretaris Daerah. Sebagai instansi yang memiliki fungsi strategis, BKAD berperan dalam memastikan penyelenggaraan keuangan daerah berjalan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kekuatan perundang-undangan.

Pembentukan BKAD bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, pengendalian belanja, hingga pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Keberadaan BKAD diharapkan dapat memperkuat sistem pertanggungjawaban keuangan daerah serta mendukung peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka mencapai visi misi Pembangunan Kabupaten Sleman.

Berikut data informasi mengenai BKAD Kabupaten Sleman :

Tempat : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
Alamat : Jl. Parasamya No.6, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon : 0274866039
Website : <https://bkad.slemankab.go.id/>
Email : bkad@slemankab.go.id

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Membangun Masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, adil, Makmur, Lestari dan berkeadaban.

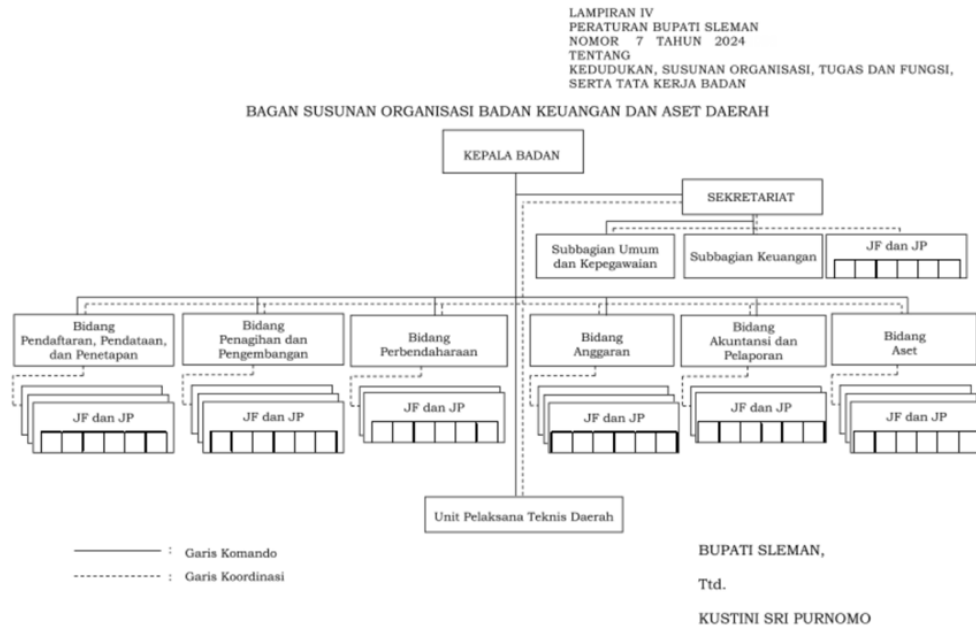
b. Misi Perusahaan

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui sektor pendidikan dan pelatihan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, guna menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
3. Menjamin akses kesehatan yang adil dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi melalui sektor pertanian, UMKM, pariwisata, serta sektor ekonomi inklusif dan kreatif.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi tegaknya hukum demi menjamin hak-hak rakyat.
6. Pemajuan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan, toleransi, dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.1.2 Struktur Perusahaan

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman disusun berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur kedudukan, bentuk organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan tersebut. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam penetapan posisi BKAD, penyusunan unsur-unsur organisasi, perincian tugas setiap bagian, dan penyelenggaraan tata kerja yang efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Sleman 1



4.2. Aktivitas Magang

Pelaksanaan program magang di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman direncanakan selama 4 bulan yaitu mulai dari 6 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Kegiatan magang dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja pukul 07.30-15.30 WIB. Selama magang ditempatkan di bidang akuntansi dan pelaporan yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan penatausahaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta pengelolaan sistem informasi keuangan. Pada tahap pelaksanaan magang diberikan berbagai aktivitas untuk mendukung pemahaman dan keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Aktivitas Magang 1

NO	Aktivitas	Oktober	November	Desember	Januari	Februari
1	Pembukaan magang					
2	Pengenalan struktur organisasi dan tugas BKAD					
3	Pelaksanaan kegiatan kantor					
4	Pengumpulan data dan informasi					
5	Menyusun laporan magang					
6	Penutupan magang					

Table 4.2 Ketercapaian Pelaksanaan Magang 1

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1	6 Oktober 2025 – 7 Oktober 2025	Pengenalan lingkungan
2	8 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Cek data rekapan pelaporan SPT masa , pengumpulan berkas B9, Rekening koran, STS, SP2D - Mencatat penerimaan LPJ - Merekap berita acara rekonsiliasi pendapatan, mencatat Realisasi Belanja dan Pajak Kabupaten Sleman dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2025
3	9 Oktober 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Mengecek data rekap laporan SPT Masa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2025 - Mencatat realisasi belanja dan pajak Kabupaten Sleman dari bulan Januari sampai dengan September 2025
4	10 Oktober 2025	Mengecek kelengkapan data 25 Puskesmas Kabupaten Sleman yaitu : SP2B, surat pernyataan tanggung jawab, SPS Fungsional, BKU Pengeluaran, rekening koran, dan rekonsiliasi dalam surat pertanggung jawaban
5	13 Oktober 2025 –	Mengecek selisih rekap pajak 27 SKPD

	15 Oktober 2025	
6	16 Oktober 2025	Mengikuti rapat pembahasan SIPD
7	17 Oktober 2025	Selisih IRA konsolidasi Kabupaten Sleman LRA
8	20 Oktober 2025 – 27 Oktober 2025	Mengerjakan narasi CALK pendapatan dan beban LO Semester 1
9	21 Oktober 2025 – 24 Oktober 2025	Sosialisasi SE Bupati nomor 0466 tahun 2025 tentang pedoman penatausahaan dan pelaporan keuangan akhir tahun 2025
10	28 Oktober 2025 – 29 Oktober 2025	Mengecek data dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Sleman
11	30 Oktober 2025	Tracing SK perubahan 1-20 Bendahara PPKD
12	31 Oktober 2025	Mengecek SPJ kegiatan yang berisikan pembayaran, tagihan, PO berita acara, notulen, dan daftar hadir
13	3 November 2025 – 9 November	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sekertariat DPRD, Dinas Pariwisata, dan Kapanewon Turi
14	10 November 2025	Mengecek kelengkapan data 25 Puskesmas Kabupaten Sleman yaitu : SP3B, surat pernyataan tanggung jawab, SPS Fungsional, BKU Pengeluaran, rekening koran, dan rekonsiliasi dalam surat pertanggung jawaban
15	11 November 2025 – 14 November 2025	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kapanewon Depok, Dinas Pendidikan
16	17 November – 21 November 2025	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir kapanewon Ngempal, Dinas Penanaman Modal, dan SATPOL PP
17	24 November 2025 – 25 November 2025	Menginput anggaran, realisasi belanja, dan realisasi pajak
18	26 November 2025 – 27 November 2025	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan

19	28 November 2025 – 31 November 2025	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Kapanewon Kalasan, Kapanewon Sleman, dan Dinas Sosial
20	1 Desember 2025 – 9 Desember 2025	Mengarsip berkas-berkas sesuai dengan SKPD yang berisikan LPJ, SPJ Fungsional, BKU, rekening koran, SPT Masa, rekapan SPT Masa
21	10 Desember 2025	Mengecek kelengkapan data 25 Puskesmas Kabupaten Sleman yaitu : SP3B, surat pernyataan tanggung jawab, SPS Fungsional, BKU Pengeluaran, rekening koran, dan rekonsiliasi dalam surat pertanggung jawaban
22	11 Desember 2025 – 12 Desember 2025	Mengarsip rekon pendapatan dan rekon belanja
23	15 Desember 2025 – 17 Desember 2025	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Sekertariat DPRD
24	18 Desember 2025	Mengecek realisasi per rekening data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bulan November 2025
25	19 Desember 2025	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Kapanewon Ngemplak
26	22 Desember 2025 – 31 Desember 2025	Mengecek kelengkapan data 27 SKPD setiap bulan dari bulan Januari sampai Desember dan mengarsipkannya
27	2 Januari 2026	Mengecek data saldo awal dan saldo akhir Kapanewon Gamping
28	7 Januari 2026 – 9 Januari 2026	Membuat CALK Semester II 2025 pada bagian LO
29	12 Januari 2026 – 14 Januari 2026	Mengecek kelengkapan data 25 Puskesmas Kabupaten Sleman yaitu : SP3B, surat pernyataan tanggung jawab, SPS Fungsional, BKU Pengeluaran, rekening koran, dan rekonsiliasi dalam surat pertanggung jawaban
30	15 Januari 2026 – 19 Januari 2026	Mengerjakan berita acara rekonsiliasi belanja dan pendapatan perSKPD

31	20 Januari 2026 – 30 Januari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Mengecek kelengkapan arsip belanja pendapatan per SKPD • Mengarsipkan GU/TU 25 puskesmas
32	2 Februari 2026 – 6 Februari 2026	<ul style="list-style-type: none"> • Menaikkan LPJ SKPD ke Bidang Perbendaharaan • Mengarsipkan RA Rekonsiliasi 25 Puskesmas dari Januari – Desember • Mengarsipkan dokumen B IX, RC, SP2D, dan STS dengan mengasih nomor ke setiap map dari tahun 2017-2022 • Berpamitan dengan pegawai

4.3. Proses Penyesuaian Perencanaan Anggaran di BKAD

Proses penyesuaian rencana anggaran merupakan bagian integral dalam pelaksanaan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Penelitian ini memperoleh data melalui wawancara dengan tiga orang informan yang berasal dari bidang yang berkaitan langsung dengan proses perencanaan dan pelaporan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman, yaitu satu orang informan dari Bidang Perencanaan serta dua orang informan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua bidang tersebut memiliki peran penting dalam proses penyusunan perencanaan anggaran, monitoring pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan realisasi anggaran. Melalui wawancara dengan informan dari kedua bidang tersebut, diperoleh gambaran mengenai bagaimana proses penyusunan perencanaan anggaran, penyesuaian perencanaan selama tahun berjalan, serta pelaksanaan dan realisasi anggaran di BKAD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman diawali dengan penyusunan Renja yang mencakup program, kegiatan, target kinerja, dan pagu anggaran. Dokumen Renja tersebut

berfungsi sebagai pedoman awal dalam pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan. Namun demikian, informan menegaskan bahwa Renja tidak bersifat kaku, sehingga memungkinkan dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, perkembangan kebutuhan, maupun kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). RFK disusun secara periodik dan berfungsi sebagai sarana monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Dalam penelitian ini, analisis RFK dilakukan secara triwulan yang mencakup Triwulan I (Maret), Triwulan II (Juni), Triwulan III (September), dan Triwulan IV (Desember) untuk menggambarkan perkembangan penyesuaian perencanaan anggaran secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Untuk memberikan gambaran mengenai proses penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman, berikut disajikan tabel perbandingan antara perencanaan awal dalam Renja dan penyesuaian perencanaan yang tercermin dalam dokumen RFK pada kegiatan-kegiatan terpilih.

Tabel 4.3 Perbandingan Perencanaan dan Penyesuaian Anggaran BKAD 1

No	Kegiatan	Awal (Renja)	Pelaksanaan (RFK)	Akhir	Analisis Singkat
1	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Direncanakan dalam tahun anggaran	Dilaksanakan bertahap setelah penyesuaian	Mencapai target pada akhir tahun	Penyesuaian perencanaan efektif mengarahkan pelaksanaan
2	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta SP2D	Direncanakan pada tahun berjalan	Pelaksanaan menyesuaikan kesiapan administrasi	Mendekati target akhir tahun	Pelaksanaan mengikuti dinamika pengelolaan kas

3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dilaksanakan sesuai kebutuhan	Intensitas meningkat menjelang akhir tahun	Realisasi tinggi sesuai kebutuhan	Penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual
---	--	-------------------------------	--	-----------------------------------	--

Tabel di atas memberikan gambaran umum mengenai bentuk penyesuaian perencanaan anggaran pada beberapa kegiatan terpilih. Selanjutnya, perkembangan pelaksanaan dan dampak penyesuaian tersebut dianalisis berdasarkan realisasi fisik dan keuangan secara triwulan melalui dokumen RFK Tahun 2024. Analisis RFK pada Triwulan I menunjukkan bahwa realisasi fisik dan keuangan masih berada pada tingkat yang rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti proses administrasi pada awal tahun anggaran, penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran, rencana yang tertuang dalam Renja belum sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Memasuki Triwulan II dan Triwulan III, hasil analisis RFK memperlihatkan adanya peningkatan realisasi fisik dan keuangan. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan mulai terlaksananya kegiatan serta dilakukan penyesuaian perencanaan anggaran terhadap kondisi aktual di lapangan. Penyesuaian yang dilakukan mencakup perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, penataan kembali alokasi anggaran serta penyesuaian target realisasi fisik dan keuangan agar lebih realistis dan dapat dicapai.

Pada Triwulan IV, hasil analisis RFK menunjukkan bahwa realisasi fisik keuangan telah mendekati target yang telah diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyesuaian perencanaan anggaran yang dilakukan secara bertahap melalui RFK efektif dalam mengarahkan pelaksanaan anggaran agar tetap selaras dengan rencana yang telah disesuaikan. Dengan demikian, penyesuaian perencanaan anggaran berperan sebagai mekanisme pengendalian terhadap rencana awal dalam Renja, bukan sebagai perubahan mendasar terhadap tujuan dan sasaran kegiatan. Pola perkembangan realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian

perencanaan anggaran yang dilakukan pada masing-masing kegiatan tercermin secara nyata dalam capaian realisasi fisik dan keuangan pada setiap triwulan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dilaksanakan secara sistematis dan bertahap dengan memperhatikan perkembangan realisasi fisik dan keuangan. Penyesuaian ini berperan penting dalam menjaga keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mencerminkan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan pengendalian anggaran. Melalui mekanisme RFK penyesuaian perencanaan anggaran dapat dilakukan secara berkelanjutan hingga akhir tahun anggaran.

4.4. Pelaksanaan dan realisasi anggaran

Pelaksanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dilakukan setelah adanya penyesuaian perencanaan yang dituangkan dalam dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana yang telah disesuaikan dengan mempertimbangkan kesiapan administrasi, pengaturan waktu pelaksanaan, serta ketersediaan anggaran. Pelaksanaan anggaran tidak dilakukan secara serentak, tetapi dijalankan secara bertahap sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kegiatan. Pendekatan bertahap ini diterapkan untuk menjamin keteraturan pelaksanaan kegiatan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dapat dipahami sebagai kelanjutan langsung dari proses penyesuaian perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis dokumen RFK secara triwulan, realisasi fisik dan keuangan menunjukkan kecenderungan peningkatan sepanjang tahun anggaran. Pada awal tahun tingkat realisasi masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan dan masih berfokus pada persiapan administratif. Setelah dilakukan penyesuaian perencanaan anggaran, realisasi mulai meningkat

pada pertengahan tahun seiring dengan mulai berjalannya kegiatan. Peningkatan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal setelah adanya penyesuaian terhadap jadwal dan target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian perencanaan anggaran memiliki peran strategis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di BKAD Sleman.

Capaian realisasi pada akhir tahun anggaran tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Sleman yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi. Informasi dari bidang akuntansi dan pelaporan menyatakan bahwa data realisasi dalam LRA telah menggambarkan kondisi pelaksanaan anggaran yang sebenarnya karena seluruh transaksi telah melalui mekanisme verifikasi dan pengendalian internal. Tingginya tingkat realisasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran dapat dikendalikan dan diarahkan secara efektif melalui penyesuaian perencanaan anggaran. Selain itu, kondisi menunjukkan bahwa rencana yang telah disesuaikan dapat diimplementasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Dengan demikian, capaian realisasi anggaran yang tinggi dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan anggaran pascapenyesuaian anggaran.

Walaupun secara umum pelaksanaan dan realisasi anggaran menunjukkan hasil yang positif, hasil wawancara mengungkapkan masih adanya beberapa kendala dalam proses pelaksanaan. Kendala tersebut meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, kebutuhan penyesuaian jadwal, dan hambatan administratif yang muncul selama pelaksanaan anggaran. Meskipun kendala tersebut tidak menghambat pencapaian target keseluruhan, diperlukan koordinasi dan penyesuaian lanjutan antar bidang untuk mengatasinya.

4.5 Evaluasi penyesuaian perencanaan anggaran

Berdasarkan keseluruhan analisis, penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan

mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta capaian realisasi fisik dan keuangan sebagaimana tercermin dalam dokumen RFK. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang disusun pada awal tahun tidak diterapkan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika pelaksanaan lapangan. Melalui mekanisme penyesuaian yang dilakukan secara berkelanjutan, perencanaan anggaran tetap relevan dan mampu merespons perubahan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Dengan demikian, penyesuaian perencanaan anggaran berfungsi sebagai sarana pengendalian untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran setelah adanya penyesuaian perencanaan menunjukkan arah yang lebih terkendali dan sistematis. Penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan, target realisasi, dan pengaturan kembali alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan di BKAD Kabupaten Sleman. Walaupun masih ada kendala, seperti keterbatasan waktu dan hambatan administratif, kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian target secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh koordinasi dan kegiatan monitoring yang dilakukan secara berkesinambungan antar bidang. Oleh karena itu penyesuaian perencanaan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Secara umum, penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dapat dinilai memberikan hasil yang positif terhadap pelaksanaan dan realisasi anggaran. Penyesuaian tersebut memungkinkan pelaksanaan anggaran tetap berjalan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Selain itu, mekanisme penyesuaian perencanaan anggaran mencerminkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan pengendalian anggaran. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa penyesuaian perencanaan anggaran mampu mengakomodasi dinamika pelaksanaan kegiatan secara efektif. Dengan demikian, penyesuaian perencanaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman merupakan bagian integral dalam pengelolaan anggaran daerah. Dokumen perencanaan anggaran yang disusun pada awal tahun melalui Rencana Kerja (Renja) memiliki sifat indikatif, sehingga memerlukan penyesuaian agar tetap sesuai dengan kondisi nyata selama pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penyesuaian perencanaan anggaran dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan melalui mekanisme Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). RFK berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah disesuaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian perencanaan anggaran dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi fisik dan keuangan pada setiap bulan. Pada tahap awal tahun anggaran, tingkat realisasi masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan masih berada dalam tahap persiapan serta penyesuaian administrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, realisasi fisik dan keuangan mengalami peningkatan setelah dilakukan penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan, target kegiatan, dan alokasi anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyesuaian perencanaan anggaran mampu mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar berlangsung lebih efektif dan terkontrol.

Secara umum, penyesuaian perencanaan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman dapat dinilai telah berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan serta realisasi anggaran. Penyesuaian tersebut memungkinkan pelaksanaan anggaran tetap selaras dengan rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Selain itu, mekanisme penyesuaian perencanaan anggaran mencerminkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran daerah yang tetap berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan pengendalian. Dengan demikian, penerapan penyesuaian perencanaan anggaran melalui RFK berperan penting dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan Kabupaten Sleman.

5.2. Saran

1. Bagi Penulis

Penulis diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi dalam menganalisis pengelolaan anggaran daerah, terutama terkait proses penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup dan metode yang lebih beragam. Penulis juga disarankan untuk memperdalam pemahaman terhadap data keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kontribusi akademik penulis di bidang keuangan publik.

2. Bagi BKAD Sleman

BKAD Kabupaten Sleman diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas mekanisme penyesuaian perencanaan anggaran yang telah diterapkan melalui RFK. Koordinasi antar bidang perlu diperkuat agar penyesuaian perencanaan anggaran dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu. Selain itu, peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diperlukan untuk mengantisipasi kendala yang muncul selama tahun anggaran berjalan. Penyediaan akses data perencanaan dan realisasi anggaran juga penting untuk mendukung transparansi dan kegiatan evaluasi. Dengan Langkah tersebut, pengelolaan anggaran daerah diharapkan semakin efektif dan akuntabel.

3. Bagi Kampus

Institusi Pendidikan disarankan untuk terus mendorong mahasiswa melakukan penelitian yang relevan dengan praktik pengelolaan keuangan di instansi pemerintah daerah. Peningkatan pembekalan materi mengenai keuangan publik dan analisis anggaran diperlukan agar mahasiswa lebih siap dalam kegiatan penelitian maupun magang. Dengan demikian, kolaborasi antar kampus dan instansi mitra dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Kapojos, A. M. (2024, Agustus). Evaluasi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus pada Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tomohon). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2.
- Arif Gunabar Fatahilla, Y. M., & Desmiyawati. (2021). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Suliantoro, I. (2020). Menimbang Kembali Formula Efisiensi pada Evaluasi Kinerja Anggaran. *Manajemen Keuangan Publik*.
- Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, I. G. (2019). Evaluasi Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Ilmiah Akuntansi*.
- Elvina Armista, F. O., & Anita, R. (2023). Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kejaksaan Tinggi Riau. *Manajemen dan Bisnis Terapan*.
- Supriyanto, B. E. (2024). *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Beban APBN*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan RI : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3690-pengukuran-dan-evaluasi-kinerja-anggaran-atas-beban-apbn.html>
- Supriyadi, Z., & Syafwandi. (2023). *Evaluasi Kinerja Organisasi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Asri Jaya, S. K., Cici Widya Prasetyandari, I. B., Mardiana, Y. A., Aris Sunandes, N., & Panus, M. M. (2022). *Manajemen Keuangan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Effendy, L. (2025). Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Utara. *Praktik Akuntansi dan Bisnis*, 1-10.
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. *IJPA*.
- Daling, M. (2023). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *EMBA*.

- Harry Al Makka, D. P., & Elim, I. (2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kotamobogu. *Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mufarrihah Mufarrihah, L. A., & Djasuli, M. (2024). Jurnal Akuntansi . *Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Perencanaan APBD Terhadap Kinerja Anggaran Daerah : Sebuah Kajian Literatur* , 1-17.
- Sulastri, C. K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik* , 1-11.
- Evi Erliyana, S. (t.thn.). Pengaruh Regulasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Aplikasi SIPD Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1-25.

LAMPIRAN
TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2026

Tempat : Kantor BKAD Sleman

Waktu : 10.00 – 11.00

Peneliti : Regita Cahyani Putri

Informan : Femy Handayani, S.STP., M.Si. (FH1)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : >40

Jabatan Informan : Perencana Ahli Muda

No	Keterangan	Wawancara
1	P	Apa saja kegiatan di BKAD Sleman?
	FH1	Untuk kegiatannya meliputi perencanaan dan penganggaran daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, BKAD juga melaksanakan kegiatan penunjang operasional perangkat daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan baik pada level BKAD sebagai perangkat daerah maupun dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kabupaten Sleman secara keseluruhan
2	P	Bagaimana peran bagian perencanaan dalam penyusunan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman?
	FH1	Peran bagian perencanaan sebagai koordinator dalam proses penyusunan anggaran di BKAD Kabupaten Sleman. Peran tersebut menuntut pemahaman yang menyeluruh terhadap tugas dan fungsi BKAD, indikator program dan kegiatan, serta

		keterkaitan anggaran dengan indikator kinerja, baik pada level perangkat daerah maupun pada level kabupaten. Bagian perencanaan tidak hanya berfokus pada besaran angka anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang disusun mampu mendukung pencapaian indikator program, kegiatan, dan sasaran Pembangunan daerah.
3	P	Bagaimana tahapan utama dalam proses penyusunan rencana anggaran di BKAD?
	FH1	Tahapan penyusunan rencana anggaran diawali dengan penerimaan pagu anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya BKAD Menyusun kertas kerja perencanaan dengan memperhatikan belanja yang bersifat mengikat, seperti gaji pegawai dan belanja wajib lainnya. Setelah itu, anggaran dipetakan ke dalam sub kegiatan berdasarkan prioritas, indikator kerja, serta kerangka acuan kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan oleh masing-masing bidang. Proses ini masih bersifat rancangan awal dan dapat mengalami penyesuaian sebelum ditetapkan secara final.
4	P	Dokumen apa saja yang menjadi dasar dalam menyusun rencana anggaran?
	FH1	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kondefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. - Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5	P	Bagaimana koordinasi antara bagian perencanaan dengan OPD lain dalam penyusunan anggaran?
	FH1	Koordinasi dilakukan melalui proses pengusulan kebutuhan anggaran dari masing-masing bidang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang kemudian dikaji dan diselaraskan oleh bagian perencanaan BKAD. Dalam proses tersebut, bagian perencanaan memastikan bahwa usulan anggaran telah sesuai dengan program pemerintah daerah, tema Pembangunan tahun berjalan, dan sasaran indikator yang ingin dicapai. Koordinasi bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai pihak terkait.
6	P	Bagaimana Ibu menilai kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran yang terjadi?
	FH1	Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi dinilai dengan membandingkan realisasi anggaran tahun berjalan dengan rencana yang telah disusun. Namun, realisasi tidak digunakan secara mutlak sebagai dasar penyusunan anggaran berikutnya. Realisasi anggaran tetap menjadi bahan pertimbangan, tetapi juga disesuaikan dengan target indikator, kebutuhan kegiatan, serta kondisi dan perkembangan situasi pada tahun berjalan.
7	P	Apakah selama pelaksanaan anggaran terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi?

	FH1	Perbedaan antara rencana dan realisasi anggaran hampir selalu terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan jadwal pelaksanaan kegiatan, yang mana tidak semua kegiatan dilaksanakan secara merata sepanjang tahun. Beberapa kegiatan baru dilaksanakan secara penuh pada semester ke dua, sehingga realisasi anggaran pada pertengahan tahun belum mencerminkan capaian akhir.
8	P	Pada kondisi atau tahap apa biasanya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran terjadi?
	FH1	Ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran umumnya terjadi pada kondisi tertentu, seperti adanya kahar (force majeure), keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan jadwal, serta faktor eksternal seperti gangguan sistem atau koordinasi lintas sektor. Selain itu, ketidaksesuaian juga dapat terjadi akibat perencanaan jadwal yang kurang tepat sehingga memerlukan penjadwalan ulang.
9	P	Bagaimana proses evaluasi yang dilakukan terhadap realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana?
	FH1	Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi anggaran secara periodik, terutama melalui pemantauan bulanan. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi maka dilakukan penelusuran terhadap penyebabnya. Dalam kondisi tertentu, target dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan. Selama masih berada dalam waktu yang memungkinkan.
10	P	Bagaimana hasil evaluasi realisasi anggaran dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya?

	FH1	Hasil evaluasi realisasi anggaran dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Realisasi anggaran digunakan untuk melihat kemampuan penyerapan anggaran dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, target indikator serta prioritas Pembangunan daerah.
11	P	Menurut Ibu, apakah perencanaan anggaran yang disusun saat ini sudah cukup mendukung kesesuaian realisasi anggaran?
	FH1	Perencanaan anggaran yang disusun saat ini prinsipnya sudah mendukung kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Namun, perencanaan anggaran tidak sepenuhnya didasarkan pada realisasi sebelumnya, melainkan juga mempertimbangkan target indikator kinerja, tema Pembangunan daerah, serta kondisi dan kebijakan yang berlaku pada tahun berjalan.

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2026

Tempat : Kantor BKAD Sleman

Waktu : 13.00 – 14.00

Peneliti : Regita Cahyani Putri

Informan : Aprilia Zusrul Hasna, S.E (AZ2)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : >45

Jabatan Informan : Staff Akuntansi dan Pelaporan

No	Keterangan	Wawancara
1	P	Bisa diceritakan bagaimana proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di BKAD dari awal sampai selesai?
	AZ2	Proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di BKAD Kabupaten Sleman diawali dari tahapan penganggaran, yaitu setelah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan belanja. Setelah anggaran dilaksanakan, realisasi belanja dicatat dan dihimpun sebagai dasar penyusunan LRA hingga akhir tahun anggaran.
2	P	Data apa saja yang biasanya digunakan sebagai dasar penyusunan LRA?
	AZ2	Data yang digunakan dalam penyusunan LRA terdiri atas beberapa komponen. Pada kolom posisi anggaran, data yang digunakan berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

		Sementara itu, pada kolom realisasi, data diperoleh dari bukti transaksi, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta Surat Tanda Setoran (STS).
3	P	Bagaimana koordinasi antara bagian akuntansi/pelaporan dengan bidang perencanaan dalam penyusunan LRA?
	AZ2	Koordinasi antara bagian akuntansi atau pelaporan dengan bidang perencanaan berjalan dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan memastikan bahwa angka anggaran yang dilaporkan telah sesuai dengan pagu anggaran dan telah dikonfirmasi kepada bidang anggaran. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali terhadap posisi anggaran setelah adanya perubahan anggaran. Apabila terdapat kendala, koordinasi dilakukan secara langsung untuk memastikan keakuratan data yang disajikan dalam LRA.
4	P	Menurut Bapak/Ibu, apakah realisasi anggaran yang tercantum dalam LRA sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat di awal tahun?
	AZ2	Secara umum realisasi belanja yang tercantum dalam LRA telah sesuai dengan perencanaan anggaran yang disusun di awal tahun. Namun demikian, dari sisi target terdapat kondisi di mana sebagian target mengalami peningkatan, sementara sebagian lainnya belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan perencanaan awal.
5	P	Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam menyusun LRA?
	AZ2	Kendala yang paling sering dihadapi dalam penyusunan LRA adalah kesalahan pada posisi rekening. Kesalahan tersebut terjadi ketika suatu belanja seharusnya dicatat pada rekening tertentu, namun dalam praktik pencatatannya tercatat pada

		rekening yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian dan koreksi dalam proses pelaporan.
6	P	Bagaimana pengaruh perubahan anggaran (DPPA) terhadap hasil LRA?
	AZ2	Perubahan anggaran (DPPA) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil LRA. Hal ini disebabkan karena dasar penyusunan LRA adalah anggaran perubahan terakhir yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap perubahan anggaran secara langsung memengaruhi posisi anggaran dan realisasi yang disajikan dalam LRA.
7	P	Bagaimana LRA digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya?
	AZ2	LRA dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan anggaran dengan melihat capaian realisasi anggaran pada tahun berjalan. Evaluasi dilakukan dengan menilai apakah anggaran yang dialokasikan mampu direalisasikan secara optimal. Sebagai contoh, apabila pada tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp100 juta namun realisasinya hanya mencapai 50 persen, maka kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dalam LRA juga terdapat informasi mengenai anggaran yang bertambah dan berkurang. Anggaran yang berkurang menunjukkan adanya selisih antara anggaran dan realisasi yang dapat disebabkan oleh efisiensi, kendala teknis, atau faktor lainnya. Sementara itu, untuk belanja, penambahan anggaran tidak dimungkinkan karena pagu telah ditetapkan dalam DPA.
8	P	Menurut Bapak, apa yang sebaiknya diperbaiki agar ke depan perencanaan dan realisasi anggaran bisa lebih selaras?

	AZ2	<p>Perbaikan perlu dilakukan pada proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setiap sub bidang atau OPD yang melaksanakan kegiatan seharusnya menyusun perencanaan anggaran sesuai dengan tugas dan kapasitasnya masing-masing serta memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan sesuai dengan yang tercantum dalam DPA. Dengan perencanaan yang lebih realistis dan terukur, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran diharapkan dapat meningkat.</p>
--	------------	--

Tanggal Wawancara : 3 Februari 2026

Tempat : Kantor BKAD Sleman

Waktu : 14.00 – 15.00

Peneliti : Regita Cahyani Putri

Informan : Sri Suryanti, S.E (SS3)

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : >45

Jabatan Informan : Ketua Tim Pelaporan

No	Keterangan	Wawancara
1	P	Dapatkah Ibu menjelaskan tugas dan peran bidang pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan di BKAD Kabupaten Sleman?
	SS3	Bidang Akuntansi dan pelaporan berperan utama sebagai penyusun laporan keuangan daerah.
2	P	Bagaimana alur penyusunan laporan realisasi anggaran mulai dari penerimaan data hingga laporan disajikan?
	SS3	Laporan realisasi anggaran dihasilkan dari penatausahaan pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penatausahaan pendapatan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, sedangkan penatausahaan belanja dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3	P	Sumber data apa saja yang digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran dan bagaimana proses verifikasi?
	SS3	Sumber data untuk pendapatan adalah penerimaan dan penyetoran pendapatan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan

		belanja dihasilkan transaksi belanja. SPJ pendapatan maupun SPJ Belanja telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) masing-masing SKPD.
4	P	Bagaimana bidang pelaporan memastikan bahwa data realisasi anggaran yang dilaporkan telah sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan?
	SS3	Bidang akuntansi dan pelaporan melakukan koreksi atas SPJ Fungsional. Kontrol juga dilakukan oleh sistem, pada saat transaksi melebihi anggaran maka tidak bisa ditransaksikan
5	P	Dalam praktiknya, apakah pernah ditemukan perbedaan antara data realisasi anggaran dan rencana anggaran saat proses pelaporan? Bagaimana penanganannya?
	SS3	Pernah, dikonfirmasi ke SKPD untuk dilakukan koreksi batal belanja dan kembalikan ke rekening giro bendahara
6	P	Bagaimana proses rekonsiliasi data realisasi anggaran antara bidang pelaporan dengan bidang lain atau OPD terkait?
	SS3	Rekonsiliasi dilakukan antara pengampu di bidang akuntansi dan pelaporan dengan SKPD dengan cara cocokkan data realisasi pendapatan dan belanja dan berpedoman pada BKU Kas Daerah.
7	P	Bagaimana peran bidang pelaporan dalam mengidentifikasi dan menjelaskan selisih antara rencana dan realisasi anggaran dalam laporan keuangan?
	SS3	Bidang akuntansi dan pelaporan berperan untuk memantau dan mendorong agar serapan anggaran segera di laksanakan sesuai ketentuan.
8	P	Bagaimana informasi hasil pelaporan realisasi anggaran dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi BKAD?
	SS3	Laporan realisasi anggaran berguna untuk bahan evaluasi dalam penganggaran tahun berikutnya.

9	P	Kendala apa saja yang biasanya dihadapi dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, khususnya terkait kesesuaian data rencana dan realisasi?
	SS3	Kendala yang mungkin timbul adalah rendahnya tingkat serapan anggaran
10	P	Menurut Ibu, sejauh mana laporan realisasi anggaran yang disusun telah mencerminkan kondisi pelaksanaan anggaran yang sebenarnya?
	SS3	Kondisi pelaksanaan anggaran yang sebenarnya? Laporan realisasi anggaran disusun sesuai dengan kondisi riil serapan anggaran.